

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM UPAYA KONSERVASI  
DAERAH TANGKAPAN AIR <sup>1</sup>**

**(sebuah pengalaman lapang di DAS Solo)**

Oleh: Taryanto Wijaya<sup>2</sup>

**I. Pendahuluan**

Kehidupan manusia dan dunia usaha dan masyarakat selalu saja tergantung kepada air. Air menjadi urat nadi kehidupan. Banyak hal bisa dilakukan dan dihasilkan saat ada air dalam jumlah cukup. Tetapi, kesulitan mulai muncul saat air tidak ada, atau jumlahnya melimpah tak terkendali. Kehidupan yang normal bisa terganggu karena permasalahan tersebut.

Acara hari ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan perjalanan panjang pengelolaan air dalam perspektif penguatan Daerah Aliran Sungai dan masyarakat serta dunia usaha yang ada di dalamnya dan upaya untuk memperbaiki daerah tangkapannya. Refleksi ini penting dalam rangka meletakkan dasar dan menyadarkan kembali bahwa air yang digunakan oleh masyarakat dan dunia usaha adalah sesuatu yang diproduksi tidak secara gratis, melainkan melalui serangkaian upaya keras, penuh pengorbanan, dan nilai-nilai solidaritas antar sesama, melalui mekanisme pertukaran jasa lingkungan antara kelompok penghasil (producer groups) dan kelompok pengguna (user groups).

Daerah Aliran Sungai (DAS) Solo dengan daerah tangkapan airnya memiliki peranan penting dalam menopang kehidupan masyarakat di 14 kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan panjangnya yang mencapai 600 km. Posisi dan perannya yang penting, menempatkan DAS ini dalam arus perhatian, di saat kita sedang mencermati kembali pola-pola dan kebijakan serta budaya pengelolaan air pada tahun 2006, dimana

---

<sup>1</sup> Refleksi kritis atas pengelolaan air di DAS Solo dalam rangka Advis Teknik Aspek Sosial Ekonomi dan Budaya dan Peranserta Masyarakat di Gedung Lantai III PSDA Propinsi Jawa Tengah, 12 Juli 2006.

<sup>2</sup> Pemimpin Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Fasilitasi Penyusunan dan Pelaksanaan RKT dan RK Jaling untuk Pengelolaan Konservasi di DAS Solo kerjasama (PERSEPSI) dan (Puslitbang Sebranmas) Departemen Pekerjaan Umum.

DAS ini termasuk dalam status DAS kritis di Indonesia. Sedangkan Waduk Wonogiri sebagai bagian dari asset nasional memiliki peranan menentukan bagia pengendalian ketersediaan air secara cukup bagi kawasan hulu, tengah maupun hilir agar fungsi pengendalian air, penyedia kebutuhan air irigasi dan air minum, pembangkit listrik, perikanan darat, dan pariwisata alam bisa diemban.

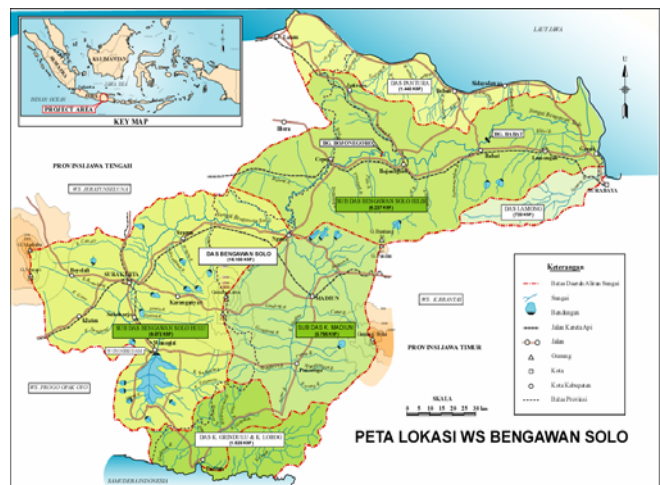
Begitu banyak masyarakat dan dunia usaha yang keberadaannya tergantung secara langsung ataupun tidak langsung pada pengelolaan air di Wonogiri, namun belum cukup kepeduliannya dalam menguatkan kualitas kehidupan masyarakat di hulu. Bahkan ungkapan yang sering muncul di hulu adalah masyarakat hulu seperti sapi perah yang selalu diambil susunya tetapi tidak pernah mendapatkan pasokan ransum yang memadai. Kondisi ini tentu akan membawa ketegangan-ketegangan yang tidak perlu untuk pengelolaan DAS dari hulu sampai hilir. Untuk itu perlu dipikirkan bersama mekanisme dan pola relasi yang lebih adil menuju pengelolaan DAS yang selaras dengan pengembangan dunia usaha dan masyarakat.

## **II. Problema DAS Solo**

Sebagai data tambahan tentang DAS Solo adalah; merupakan sungai terpanjang di pulau Jawa dengan panjang 600 Km luas daerah tangkapan 1,9 juta hektar menjangkau alirannya di 2 propinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur atau melintasi pada 14 kabupaten. Bengawan solo di bagi wilayah hulu dengan kabupaten; Pacitan, Wonogiri, Karanganyar, Sukoharjo, Boyolali dan Klaten, wilayah tengah, Kabupaten Ngawi, Madiun, Magetan, Ponorogo dan Hilir; Kabupaten Bojonegoro, Tuban dan Gresik, Lamongan. DAS ini memiliki karakteristik penting dari segi 1) panjang daerah alirannya, 2) banyaknya daerah yang dijangkau, 3) lintasannya yang melewati 2 propinsi, dan 4) banyaknya persoalan sosial ekonomi yang perlu dipertimbangkan secara terpadu, 5) banyak lembaga yang terlibat dalam pengelolaannya.

Dalam pengelolaan suatu Daerah Aliran Sungai (DAS), permasalahan lingkungan hidup dan peningkatan ekonomi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan dalam pelaksanaannya. Hal ini karena, peningkatan ekonomi masyarakat yang salah satunya diterjemahkan pada peningkatan produktivitas usahatani yang dilakukan membutuhkan akan kesuburan lahan secara berkelanjutan, sementara keberdayaan secara ekonomis bagi masyarakat (petani) sangat mempengaruhi kesadaran dan tindakan pada praktek budidaya dan konservasi yang dilakukan.

Daerah Aliran Sungai (DAS) Solo yang lebih banyak dikenal dengan sebutan ***Bengawan Solo***, dengan berbagai multifungsi yang disangganya, kian saja menunjukkan kerusakan atau penurunan kualitas lingkungannya. Hal ini sekurangnya ditandai oleh perubahan yang sangat fluktuatif dari kuantitas air yang melaluinya



antara musim penghujan dengan banjirnya, dan pada musim kemarau dengan kekeringannya. Kondisi demikian diantaranya disebabkan oleh PENGELOLAAN lahan pertanian yang kurang memperhatikan kaidah-kaidah konservasi, berkembangnya kawasan pemukiman dan industri serta permasalahan lainnya. Dalam catatan Forum Peduli DAS Solo ( Forpeddas) tahun 2004, terdapat beberapa permasalahan diantaranya :

- **Tingginya erosi di wilayah DAS dan sediment di sungai**
- **Maraknya penebangan liar**
- **Susutnya air yang menyolok pada musim kemarau**
- **Masih lemahnya kelembagaan petani**
- **Lemahnya koordinasi lintas institusi pengembang DAS Solo**
- **Dan belum terfasilitasinya secara memadai komunikasi / koordinasi antara komunitas hulu dan komunitas tengah dan hilir DAS**

Di sisi lain, penanganan DAS lebih menuntut pendekatan kesatuan ekologis DAS, dan tidak bisa disekat-sekat oleh batas-batas administratif kewilayahan. Pada kenyataannya, dalam era otonomi daerah muncul kecenderungan bahwa setiap wilayah kabupaten akan memperbesar penggunaan potensi-potensinya yang cenderung eksploitatif hingga kurang mempertimbangkan dampaknya bagi sistem ekologi DAS yang ideal. Kecenderungan ini dalam jangka menengah dan panjang jelas akan merugikan berbagai hasil tatanan lingkungan yang menyangga kehidupan selama ini. Keadaan demikian juga bisa memicu pertikaian tidak sehat antar wilayah yang membahayakan secara ekologis.

### **III. Problema Masyarakat Wonogiri di Hulu DAS Solo**

Kabupaten Wonogiri memiliki luas 182.236 ha. Dari luas tersebut secara topografi 118.453 ha (65%) merupakan perbukitan, 54.670 ha (30%) landai dan hanya 9.111 ha (5%) merupakan areal datar. Berdasar itu maka pola pengembangan usahatani sistem hutan rakyat, telah dikembangkan dan dirasa sesuai bagi Wonogiri, terlebih posisi wilayah ini sebagai hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Solo atau yang lebih dikenal dengan Bengawan Solo.

Kabupaten ini terdiri dari 25 kecamatan, 298 desa/ kelurahan dengan penduduk 1.112.825 jiwa dengan 51% nya adalah perempuan. Dari segi rumah tangga, terdapat 244.386 KK dengan rata-rata 5 orang jiwa/ KK ( hasil sensus P4B 2003 ). Sektor pertanian ( dominasi pola pertanian hutan rakyat) masih mendominasi pendapatan rakyat dan 40,9 % tenaga kerja bekerja di sektor ini dengan kontribusi terhadap PDRB kabupaten Wonogiri sebesar 48,44 %. Namun ironisnya, sebagaimana tertuang pada rancangan APBD tahun 2004, sektor ini hanya memperoleh alokasi 1,3 % dari total Rp 185 milyar. ( **Rakorbang Kab. Wonogiri, 2004** ).

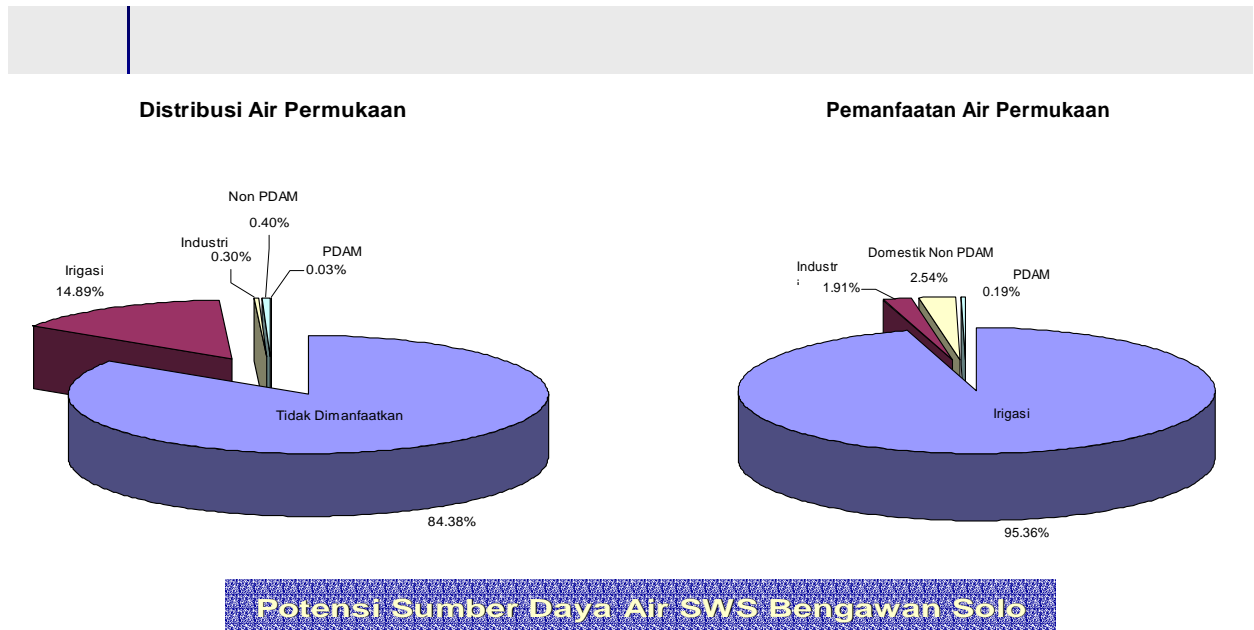
Pertumbuhan ekonomi sekalipun mengalami minus 5,3 % tahun 1998, namun pada tahun 2002 telah merangkak menjadi 3,7 %. Dari sisi penggunaan lahan dari luas lahan

182.236 ha, untuk sawah 30.701 (16,85%) dan tegal 61.011 (33.48%), hutan rakyat 15.320 ha (8,4%), hutan negara 16.268 ha (8,9%).

Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertambangan (LHKP) Kabupaten Wonogiri diharapkan bisa menjadi mesin penghasil PADs sebesar Rp 1.110.000.000. Dari jumlah tersebut sebanyak Rp 1.100.000.000 diperoleh dari Retribusi Ijin Pengangkutan Kayu Rakyat, sedangkan sisanya Rp 10.000.000 berasal dari Retribusi Ijin Pertambangan. (APBD Kab. Wonogiri, 2005). Jumlah di atas dirasa sangat fantastis, bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2003 yang hanya dipatok menghasilkan 400.000 dan pada 2004 yang dipatok hanya 350.000. (APBD Kab. Wonogiri 2004)

#### IV. Dunia Usaha Berbasis Air

Sebanyak 81,38% distribusi air permukaan di DAS Solo belum dimanfaatkan, selebihnya diserap untuk irigasi (11,89%), industri (0,30%), PDAM 0.03%, dan non PDAM 0.10%.



Sumber: Pengelolaan SDA di PJT I Bengawan Solo, 2005.

Sedangkan Pemanfaatan air permukaan didominasi untuk kepentingan irigasi (95,36%), industri 1,91%, rumah tangga Non PDAM 2.54%, dan PDAM 0,19%.

Rendahnya pemanfaatan sumberdaya air ini oleh dunia usaha juga berdampak pada rendahnya penerimaan jasa dari pengelolaan sumberdaya air. Sementara itu, para petani di tengah dan hilir DAS Solo sebagai pengguna terbesar air permukaan sebenarnya telah menggunakan jasa lingkungan yang dihasilkan masyarakat hulu sehingga bisa tanam 2-3 kali dalam setahun, tidak mengalami kekeringan air, punya peluang banyak untuk berkembang, belum menunjukkan minat dan upaya untuk menyumbangkan sebagian dari penghasilannya untuk perbaikan kondisi konservasi, ekonomi dan kelembagaan masyarakat hulu melalui mekanisme transaksi jasa lingkungan. Dan dalam 5 tahun terakhir kalangan petani dihantam bertubi-tubi oleh beratnya harga-harga barang input pertanian, dan rendahnya harga hasil pertanian yang bisa dinikmati petani. Meski jumlahnya besar, tetapi untuk sementara waktu kalangan pengguna jasa ini cukup dikategorikan sebagai pengguna jasa potensial untuk transaksi jasa lingkungan dalam jangka panjang.

Dunia usaha menjadi pemain penting yang diharapkan bisa memberikan contoh bagaimana dunia usaha menghargai prestasi-prestasi masyarakat penghasil jasa lingkungan baik di hilir, tengah maupun dan apalagi di hulu melalui mekanisme transaksi demi keberlanjutan kehidupan dunia usaha itu sendiri maupun masyarakat. Sebagai gambaran, hasil dari dunia usaha yang berkontribusi dalam upaya pengelolaan jasa lingkungan pada tahun 2004 adalah sebagai berikut.

#### **Kontribusi BJPSDA dari pemanfaat (PLN, Industri & PDAM) 2004**

- PLN : Rp 1,13 Milyar
- PDAM : Rp 0,18 Milyar
- Industri : Rp 2,56 Milyar
- TOTAL : Rp 3,86 Milyar → 9,7 % dari Kebutuhan Biaya O&P Normal

Sementara itu, Kebutuhan Biaya Normal O&P di SWS Bengawan Solo tahun 2004 adalah sebesar Rp 39,61 Milyar. Ini artinya, ketergantungan pengelolaan DAS Solo masih sangat tergantung kepada subsidi anggaran negara, dan masih lemahnya pengumpulan jasa dari

para pengguna jasa lingkungan yang memanfaatkan jasa lingkungan dari pengelolaan DAS Solo.

## **V. Menggalakan Wacana dan Upaya Baru**

Pengelolaan DAS ini penting untuk memastikan kecukupan air bagi kepentingan konsumsi maupun irigasi dan pertanian serta perikanan, dan juga pengendalian banjir dan kekeringan baik di daerah hulu, tengah maupun hilir. Pengelolaan DAS ini telah dilakukan melalui penataan 3 aspek penting yakni 1) kelembagaan yang menangani, 2) teknis konservasi, dan 3) pengembangan ekonomi masyarakat.

Berbagai upaya pengelolaan DAS telah menghasilkan jasa lingkungan yang telah dimanfaatkan dengan para penggunanya baik secara langsung maupun tidak langsung. Jasa lingkungan tersebut dihasilkan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang mengelola daerah tangkapan DAS dalam satuan administrasi desa maupun kawasan hamparan. Jasa lingkungan tersebut berupa a) ketersediaan air secara cukup di daerah hilir, 2) udara bersih dan sehat di daerah hulu, 3) tertahannya erosi oleh bangunan konservasi vegetatif maupun sivil teknis, dan 4) terkendalinya aliran air sehingga tak menimbulkan banjir dan kekeringan.

Kejadian-kejadian diatas, memperlihatkan bahwa suatu DAS harus dikelola bersama antar daerah (hulu dan hilir) karena merupakan suatu sistem hidrologi. Aktifitas pemanfaatan lahan di wilayah hulu DAS yang tidak mengindahkan kaidah-kaidah konservasi akan berakibat pada timbulnya masalah pada daerah hilir. Oleh sebab itu secara ideal, konsepsi PENGELOLAAN DAS seharusnya mengarah kepada : 1) Asas keterpaduan dalam PENGELOLAAN DAS, 2) Asas penanggungungan biaya bersama (Cost Sharing Principle) dan 3) Asas peningkatan partisipasi masyarakat (Participation in Watershed Management).

Dalam konteks DAS Solo, ditemukan 4 keadaan penting sebagai berikut: 1) masih tingginya persen angka penduduk miskin di daerah hulu ( rata-rata 60% dari total

penduduk, 2) besarnya tuntutan kepada masyarakat di kawasan hulu untuk melakukan konservasi tanpa kompensasi atas biaya yang hilang (*opportunity cost*) dari melakukan konservasi, 3) belum adanya mekanisme yang mengatur biaya dan keuntungan bersama (profit and cost sharing) antara kelompok masyarakat yang menghasilkan jasa lingkungan (*producer of environmental services*) maupun pihak yang menggunakan jasa lingkungan untuk mendukung usahanya (*user of environmental services*), 4) rendahnya kepedulian berbagai pihak mengantarai upaya-upaya memprakarsai pengembangan jasa lingkungan di DAS Solo sebagai salah satu DAS penting yang menyangga kehidupan sebagian masyarakat Pulau Jawa yang berpenduduk sangat padat.

## **VI. Isu Kritis Dihadapi**

Berdasar uraian di atas ada 3 isu kritis lingkungan yang mengemuka di DAS Solo 1) kesenjangan kontribusi biaya dan keuntungan antara penghasil dan pengguna jasa lingkungan baik di hulu, tengah maupun hilir, dan 2) tidak adanya mekanisme yang disepakati bersama untuk pengaturan pemanfaatan jasa lingkungan, antara penghasil dan penggunaannya. 3. tidak imbangnya pengelolaan komitmen masyarakat di hulu tengah dan hilir dalam pengelolaan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk berbagi manfaat jasa lingkungan (*sharing of environmental service's values*).

Berdasar berbagai pengalaman di atas dan kebutuhan untuk melakukan memperbaiki kinerja pengelolaan air di kawasan Wonogiri sebagai penyangga penting kehidupan masyarakat dan dunia usaha di DAS Solo, maka telah dilakukan 2 studi dan fasilitasi upaya rintisan, yakni 1) Fasilitasi Penyusunan Rencana Konservasi Tanah di Desa (RKTD) secara partisipatif di 24 desa yang mewakili kondisi 6 sub DAS yang masuk ke Waduk Wonogiri, dan 2) Penyusunan Rencana Kerja Pengelolaan Jasa Lingkungan (RK Jaling) pada dua desa sebagai model pengelolaan jasa lingkungan berbasis komunitas pengelola lingkungan hidup di kawasan hulu. Dua upaya rintisan ini menjadi penting sebagai langkah awal untuk menata berbagai kesiapan untuk memasuki era baru dalam

pengelolaan jasa lingkungan melalui mekanisme transaksi secara saling menguntungkan dan berkelanjutan.

**Daftar Desa telah menyusun Rencana Konservasi Tanah di Desa (RKTD) dan Rencana Kerja Pengelolaan Jasa Lingkungan (RK Jaling)**

a. DAFTAR DESA YANG TELAH MENYUSUN RENCANA KONSERVASI TANAH DI DESA

NO	DESA DAN KECAMATAN	SUB DAS	(Bidang Rencana)		
			Konservasi	Ekonomi	Kelembagaan
1	Karang, Slogohimo	Keduwang	V	V	V
2	Setren, Slogohimo	Keduwang	V	V	V
3	Sokoboyo, Slogohimo	Keduwang	V	V	V
4	Watusomo, Slogohimo	Keduwang	V	V	V
5	Pandan, Slogohimo	Keduwang	V	V	V
6	Sumberejo, Jtsrono	Keduwang	V	V	V
7	Pingkuk, Jatiroto	Keduwang	V	V	V
8	Sembukan, Sidohajo	Keduwang	V	V	V
9	Gemawang, Ngadirojo	Keduwang	V	V	V
10	Pakisbaru, Nawangan, Jatim	Tirtomoyo	V	V	V
11	Hargorejo, Tirtomoyo	Tirtomoyo	V	V	V
12	Sukoharjo, Tirtomoyo	Tirtomoyo	V	V	V
13	Beji, Nguntoronadi	Tirtomoyo	V	V	V
14	Kulurejo, Nguntoronadi	Tirtomoyo	V	V	V
15	Pijiharjo, Manyaran	Wuryantoro	V	V	V
16	Pulutan Kln, Wuryantoro	Wuryantoro	V	V	V
17	Ngandong, Eromoko	Alang Ngunggahan	V	V	V
18	Tempurharjo, Eromoko	Alang Ngunggahan	V	V	V
19	Tegiri, Batuwarno	Temon	V	V	V
20	Belikurip, Baturetno	Temon	V	V	V
21	Jeblogan, Karangtengah	Solo Hulu	V	V	V
22	Ngancar, Giriwoyo	Solo Hulu	V	V	V
23	Selomerto, Giriwoyo	Solo Hulu	V	V	V
24	Platarejo, Grwoyo	Solo Hulu	V	V	V

Sumber: Participatory Rural Appraisal (PRA) PERSEPSI 2005

## b. Rencana Kerja Pengelolaan Jasa Lingkungan (RK Jaling)

No	Desa, Kecamatan	Sub DAS	(Bidang Rencana)		
			Konservasi	Ekonomi	Kelembagaan
1	Sumberejo, Batuwarno	Temon	V	V	V
2	Gemawang, Ngadiroj	Keduwang	V	V	V

Ini memerlukan dukungan para pihak dalam berbagai bentuk kontribusi in natura, fasilitasi pelatihan, pengembangan ekonomi, dan kerjasama saling menguntungkan maupun transaksi jasa lingkungan agar tercipta pola hubungan yang adil dan lestari.

Sedangkan tahun 2006 ini sedang difasilitasi implementasi rencana-rencana tersebut sebagai upaya yang diharapkan berkontribusi pada upaya memperbaiki kinerja pengelolaan lingkungan di Daerah Tangkapan Air (DTA) di hulu DAS Solo.

Pada tahun ini pula sedang difasilitasi hal serupa untuk masyarakat yang mewakili kawasan tengah dan hilir sebagai berikut.

NO	NAMA DESA	KECAMATA N	KABUPATEN	SUB DAS	KETE- RANGAN
1	Bodak	Kare	Madiun	Kali Catur	Tengah
2	Bolo	Kare	Madiun	Kali Catur	Tengah
3	Tawangrejo	Gemarang	Madiun	Kali Ketok	Tengah
4	Batok	Gemarang	Madiun	Kali Ketok	Tengah
5	Pajeng	Kaligondang	Bojonegoro	Kali Gondang	Hilir
6	Sumber Pucung	Kaligondang	Bojonegoro	Kali Gondang	Hilir
7	Bogo	Kapas	Bojonegoro	Kali Gondang	Hilir
8	Semenpinggir	Kapas	Bojonegoro	Kali Gondang	Hilir

Catatan: 8 desa di 4 kecamatan, 2 Kabupaten dan 1 Propinsi mewakili kawasan tengah dan hilir DAS Solo.

## VII. Tujuan

Studi ini bertujuan 1) diperolehnya penilaian kondisi desa berdasar sumber erosi di daerah tangkapan waduk (DTW), 2) terfasilitasinya penyusunan RKT dan RK Jaling melalui mekanisme transaksi antara penghasil dan pengguna jasa lingkungan. Keluaran studi ini berupa 1) hasil penilaian kondisi desa di daerah

tangkapan waduk berdasar jumlah lokasi tererosi, 2) rencana konservasi tanah di desa (RKTD) dan rencana pengelolaan jasa lingkungan (RK Jaling) sebagai model pengelolaan air oleh komunitas bersama para pihak dalam rangka GNKPA.

### **VIII. Output**

Melalui berbagai upaya tersebut sebenarnya ada keluaran yang akan butuh dicapai bersama dan menuntut keterlibatan para pihak pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan pelestarian sumberdaya air. Keluaran tersebut berupa:

1. Komunitas masyarakat di 33 desa yang mewakili masyarakat hulu, tengah, dan hilir memiliki rencana dan bisa berkontribusi dalam pelestarian tanah dan sumber air sebagai penyangga kehidupan bersama.
2. Munculnya kesadaran dan kesiapan baru dari kalangan dunia usaha untuk berkontribusi dalam pengelolaan kelestarian lingkungan hidup dan pembedayaan masyarakat melalui mekanisme transaksi jasa lingkungan.
3. Sinergisnya berbagai kebijakan, program, alokasi sumberdaya, anggaran, pengalaman antar pihak dalam mendukung pengelolaan jasa lingkungan untuk penguatan pengelolaan DAS Solo.

### **IX. Methodologi**

Secara methodologi, studi ini dilakukan melalui 3 tahapan, yakni 1) penilaian desa dan penyusunan draft RKTD dan RK Jaling, 2) lokakarya desa untuk penetapan draft tersebut menjadi rencana desa, 3) lokakarya kabupaten dan nasional untuk mendapatkan masukan bagi upaya tindak lanjutnya.

## **X. Pemberdayaan Masyarakat untuk Konservasi DTA**

### Pengertian

Pemberdayaan masyarakat dalam konservasi daerah tangkapan air merupakan serangkaian kegiatan secara sistematis untuk memperbaiki dan meningkatkan akses masyarakat pada pengelolaan sumberdaya air dan daerah tangkapannya serta kontrol masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk kelestariannya.

### Tujuan

Meningkatnya akses dan kontrol masyarakat pada pengelolaan dan pengendalian sumberdaya air.

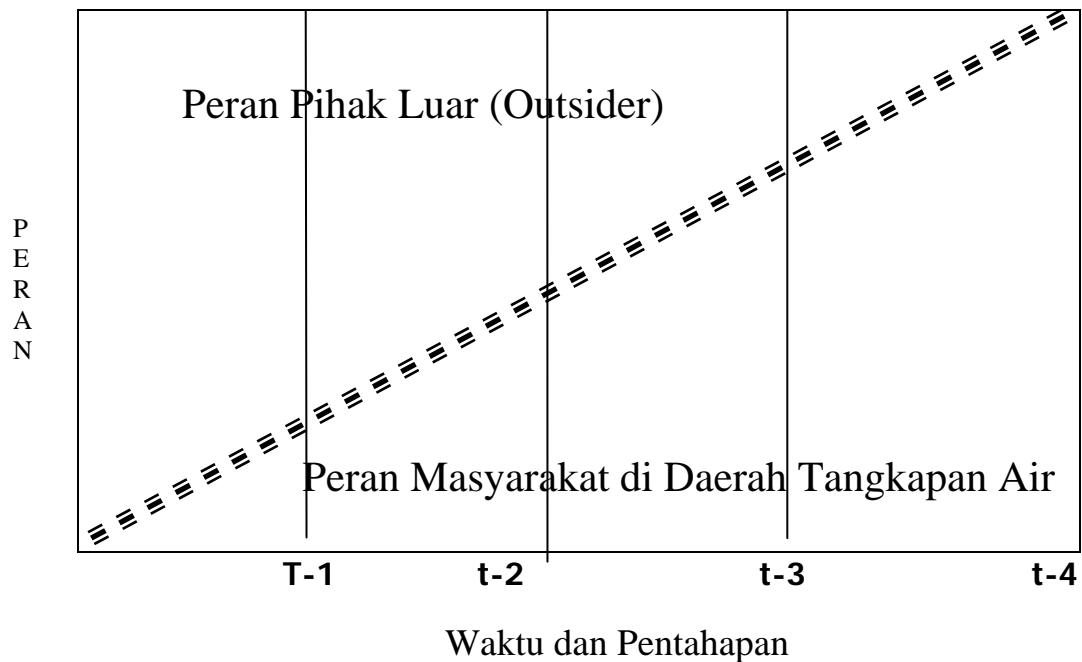
### Maksud:

Meningkatnya kesejahteraan sosial ekonomi dan lingkungan masyarakat melalui partisipasi dalam pengelolaan air dan pemeliharaan daerah tangkapannya.

Tahapan Rinci Proses Pemberdayaan, melalui fasilitasi untuk:

1. Penjajagan Kebutuhan dan Analisis Masalah secara Partisipatif.
2. Perumusan Alternatif dan Pemilihan Tindakan berdasar skala prioritas.
3. Penyusunan Rencana Tindak (Kegiatan, hasil diharapkan, ukuran keberhasilan, waktu, penanggungjawab, lokasi, dan biaya (swadaya dan dukungan pihak lain).
4. Pengembangan kapasitas dan kapabilitas kelompok masyarakat.
5. Implementasi Rencana Tindak.
6. Hubungan kerjasama dan jaringan informasi serta akses ke permodalan usaha.
7. Penguatan kelembagaan masyarakat untuk belajar dan menentukan pengambilan keputusan pengelolaan sumberdaya air dan rencana tindak yang dibuat.
8. Monitoring dan evaluasi berkala secara partisipatif.
9. Pemandirian (phasing out).

## XI. Pembagian Peran dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat



**Sumber: Pengalaman Lapang PERSEPSI, 2000-2006**

### Keterangan:

Intervensi pihak luar menurun sejalan dengan bertambahnya waktu pemberdayaan, yang memberi ruang dan kekuasaan bagi masyarakat untuk mengambil inisiatif dan keputusan bagi pemecahan masalah dan potensi yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari dan perubahannya ke depan.

Proses di atas dapat dibagi ke dalam empat tahapan kritis sebagai berikut:

1. Tahap penyadaran
2. Tahap pengembangan
3. Tahap pendewasaan
4. Tahap pemandirian

Pada tahap penyadaran kerja pihak luar masih sangat dominan di saat prakarsa dan partisipasi masyarakat masih rendah karena banyak pihak yang belum menyadari adanya masalah bersama yang mengancam kehidupan atau usaha masyarakat. Pada tahap ini penjajagan kebutuhan (need assessment) dan analisa masalah secara kritis dan partisipatif dilakukan.



Sedangkan pada tahap pengembangan masyarakat mulai bisa diajak berbincang dan menyusun rencana tindak, memecahkan masalah-masalah praktis, melakukan pengorganisasian kegiatan sederhana, serta melaksanakan rencana yang telah

dibuat. Pada tahap ini peran pihak luar (outsider) masih besar dan masyarakat mulai tahu apa dan harus berbuat apa atas masalah yang dihadapi.

Pada tahap pendewasaan masyarakat melakukan, belajar dan menganalisa teknis kegiatan serta methodologi pengelolaan program. Ini tahapan yang krusial dalam pemberdayaan masyarakat, sebab pada tahap ini sebenarnya terjadi proses transfer dan transformasi gagasan, pengalaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi serta berbagai kearifan dalam pengelolaan daerah tangkapan air dan kelembagaan masyarakat.

Pada tahap pemandirian (phasing out) peran masyarakat kian dominan sedang peran pihak luar mengecil dan masyarakat telah bisa mengambil keputusan sendiri atas apa yang perlu dilakukan dengan siapa melakukan dan mobilisasi apa saja yang perlu dilakukan (orang, dana sumberdaya, keahlian dan lain-lain) untuk mengatasi masalah dan potensi yang ada dalam pengelolaan daerah tangkapan air secara adil dan lestari.

## XII. Model Pendekatan dalam Pemberdayaan Masyarakat

TINGKAT PARTISIPASI		
<b>PEMBERDAYAAN</b> (Masyarakat sebagai agen perubahan)    <b>KARITATIF /RELIEF</b> (Masyarakat sebagai penerima manfaat)	<b>Merencanakan/melaksanakan/mengevaluasi solusi masalah dan bertanggungjawab pada aksi pembangunan</b>	<b>AKTIF</b> (keputusan diambil oleh partisipan)    <b>PASIF</b> (Keputusan diambil oleh orang lain)
	<b>Berkonsultasi mengenai masalah dan kebutuhan pengembangan</b>	
	<b>Mengambil Tindakan dari rencana orang lain (menyumbang tenaga, menghadiri seminar)</b>	
	<b>Menerima manfaat (material, jasa)</b>	
	<b>Menerima hibah</b>	

Sumber: Gender Toolkit (Pedoman untuk Pengguna) dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Proyek (FADO, 2000)

Dengan demikian pemberdayaan masyarakat mengasumsikan dan percaya bahwa masyarakat memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah mereka sendiri melalui fasilitasi tertentu oleh pihak lain. Itu artinya harus ada saling kepercayaan (trust) antara yang didampingi dan yang mendampingi (Dinas, Badan, LSM, Perusahaan dll) yang melakukan pemberdayaan.

### **XIII. Kesimpulan**

- 1) Studi telah mengidentifikasi adanya 271 area erosi, dengan 532 lokasi tererosi di dalamnya pada 180 dusun di 24 desa, dengan jenis erosi permukaan 206 lokasi (40,29%), jurang 106 lokasi (20.69%), tebing 150 lokasi (29,31 %), dan tanah longsor 50 lokasi (9,71%), dan upaya-upaya penanganan yang dipikirkan masyarakat.
- 2) Studi telah memfasilitasi penyusunan RKTG (di 24 desa) dan RK Jaling (2 desa) pada tahun 2005 dan mengawal implementasinya pada tahun 2006.
- 3) Studi telah menganalisis secara mendalam perlunya pengelolaan sumberdaya air di DAS Solo memperhatikan penguatan kapasitas 1) upaya konservasi, 2) pengembangan ekonomi masyarakat, dan 3) pengembangan kelembagaan masyarakat pelestari sumberdaya air.
- 4) Studi ini merupakan bentuk kontribusi masyarakat dan para pihak pengembang masyarakat dalam rangka GNKPA dan mendukung penajaman arah peringatan Hari Air se Dunia tahun 2006 serta konservasi di daerah tangkapan air Waduk Wonogiri.